

**PERKEMBANGAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PERTAMA
TAHUN 1928 DI YOGYAKARTA**

JURNAL



**Oleh:
WININGSARI TRIMURTINI
11406244010**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

PERKEMBANGAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PERTAMA TAHUN 1928 DI YOGYAKARTA

Peneliti 1 : Winingsari Trimurtini
Peneliti 2 : Terry Irenewaty, M.Hum
Universitas Negeri Yogyakarta
twiningsari@yahoo.com

ABSTRAK

Pergerakan wanita Indonesia menjadi salah satu pergerakan nasional yang belum banyak dikaji. Pergerakan wanita Indonesia awal masa pergerakan nasional bersatu dan terkumpul dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) pergerakan wanita Indonesia pada masa pergerakan nasional, (2) pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama, dan (3) perkembangan Kongres Perempuan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama ialah menentukan topic penelitian. Tahap kedua ialah heuristik atau pengumpulan sumber penelitian, Tahap ketiga ialah verifikasi atau kritik sumber. Tahap keempat ialah tahap interpretasi yaitu proses menafsirkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Tahap terakhir ialah historiografi atau penulisan sejarah.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) pergerakan wanita Indonesia masa pergerakan nasional terjadi karena adanya semangat kebangsaan yang tumbuh dan berkembang saat masa penjajahan. Banyak hambatan yang dihadapi oleh kaum wanita untuk dapat menentukan sendiri kehendaknya mendorong terjadinya pergerakan wanita. Pergerakan wanita Indonesia masa pergerakan nasional terbagi menjadi tiga periode yakni periode sebelum tahun 1920, periode tahun 1920-1930 dan periode sesudah tahun 1930 dengan latar belakang masing-masing periode yang berbeda, (2) pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama terjadi pada 22-25 Desember 1928 di Dalem Joyodipuran, Yogyakarta dengan latar belakang untuk menyatukan gerakan organisasi wanita. Organisasi wanita saling membulatkan tekad untuk mendukung persatuan Indonesia. Kongres berlangsung dengan berbagai agenda acara dan pertemuan serta menghasilkan beberapa keputusan penting menyangkut kehidupan wanita Indonesia, dan (3) perkembangan Kongres Perempuan Indonesia selanjutnya berlanjut pada Kongres Perempuan Indonesia Kedua, Kongres Perempuan Indonesia Ketiga, dan Kongres Perempuan Indonesia Keempat.

Kata Kunci: Kongres, Pergerakan, Wanita, 1928

THE DEVELOPMENT OF INDONESIAN WOMEN'S FIRST CONGRESS IN 1928 IN YOGYAKARTA

ABSTRACT

Indonesian women's movements were national movements that have not been much studied. Indonesian women's movements in the beginning era of the national movement were united and unified in Indonesian Women's First Congress in Yogyakarta. This study aims to investigate: (1) Indonesian women's movements during the national movement era, (2) the execution of Indonesian Women's First Congress, and (3) the development of Indonesian Women's Congress.

The study employed the critical historical research method according to Kuntowijoyo consisting of five stages. The first stage was determining the research topic. The second stage was heuristics or research source collection. The third stage was verification or source criticism. The fourth stage was interpretation, namely a process of interpreting historical facts that were found. The final stage was historiography or history writing.

The results of the study were as follows. (1) Indonesian women's movements during the national movement era took place because there was nationalism spirit growing and developing during the colonial era. A lot of constraints were encountered by women in order to have self-determination, triggering women's movements to occur. Indonesian women's movements during

the national movement era could be classified into three periods, namely the period before 1920, the period 1920-1930, and the period after 1930 with different backgrounds for each period. (2) Indonesian Women's First Congress was conducted on 22-25 December 1928, at Dalem Joyodipuran, Yogyakarta, with a background to unify organizations of women's movements. Women's organizations had one intention to support the Indonesian unity. The congress was conducted with a variety of agendas and meetings and resulted in several important decisions regarding Indonesian women's life. (3) The development of Indonesian Women's First Congress then continued with Indonesian Women's Second Congress, Indonesian Women's Third Congress, and Indonesian Women's Fourth Congress.

Keywords: *Congres, Movements, Women, 1928*

I. PENDAHULUAN

Kesadaran nasional bukan merupakan hak dan monopoli kaum lelaki saja, namun kaum wanita pun berhak dan berkewajiban untuk ikut terjun dalam kancah perjuangan politik. Mulanya awal kebangkitan pergerakan wanita ini hanya berada di lapisan atas, tetapi kemudian dalam perkembangannya makin meluas ke lapisan bawah. Berkembangnya pergerakan ini juga dengan tujuan yang makin bertambah dan mantap.

Timbulnya pergerakan wanita merupakan realisasi dari cita-cita Kartini yang memperjuangkan perbaikan kedudukan sosial wanita. Pergerakan wanita awal abad ke-20 identik dengan pergerakan pada wilayah sosial dan pendidikan. Mereka lebih banyak bergerak pada perbaikan kedudukan sosial dan peningkatan kecakapan melalui pendidikan maupun keterampilan serta perbaikan dalam hidup keluarga, perkawinan dan mempertinggi kecakapan sebagai seorang ibu.¹ Urusan politik belum menjadi konsentrasi utama pergerakan wanita awal abad ke-20.

Setelah tahun 1920 organisasi wanita semakin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dilakukan bersama-sama organisasi sosial dan politik pada umumnya. Keterlibatan kaum wanita pada masa pergerakan nasional dimulai dengan keberadaan bagian wanita di organisasi-organisasi induk seperti Puteri Mardika yang merupakan organisasi keputrian di Budi Utomo. Sebagai bagian dari organisasi induk tentu jalan pergerakan wanita harus mengikuti organisasi induk tersebut.

Sesuai dengan tuntutan zaman dan suasana perjuangan politik yang makin meningkat, maka timbul kesadaran nasional kaum wanita. Setelah itu muncul berbagai gerakan wanita lain dan semakin banyak, bahkan mulai muncul berbagai organisasi yang

¹ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 102.

berjuang untuk membela hak-hak wanita seperti hak mereka dalam perkawinan. Adanya perubahan ini tidak saja mendatangkan perbaikan nasib tetapi juga menambah kesanggupan dan kecakapan wanita dalam hal berorganisasi. Berbagai perkumpulan lahir dan berkembang baik yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari partai politik atau organisasi lain yang anggotanya terdiri dari kaum lelaki. Perkumpulan-perkumpulan wanita ini yang merupakan pergerakan nasional bagian wanita.² Semakin meningkatnya perjuangan nasional dan timbulnya berbagai perkumpulan atau organisasi, maka berdiri pula perkumpulan-perkumpulan wanita.

Paham kebangsaan dan persatuan Indonesia berkembang dalam beberapa jenis organisasi wanita tersebut, oleh karenanya guna membulatkan tekad dan mendukung persatuan Indonesia diadakan Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta sebagai manifestasi dari kesadaran nasional kaum wanita. Kongres Perempuan Indonesia Pertama ini dilaksanakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 yang bertujuan mempersatukan cita-cita dan memajukan wanita Indonesia serta membuat gabungan organisasi wanita.

Kongres tersebut dihadiri kurang lebih 30 perkumpulan wanita. Kongres Perempuan Indonesia yang pertama ini dipimpin oleh R.A. Soekonto sebagai ketua, St. Mundjiah sebagai wakil ketua, Siti Sukaptinah sebagai sekertaris 1, Sunaryati sebagai sekertaris II dan R.A Harjodiningrat sebagai bendahara.³

Tujuan dari diadakannya Kongres Perempuan Indonesia Pertama ialah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Kongres ini berhasil memutuskan untuk mendirikan gabungan atau federasi perkumpulan wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) dan yang berkedudukan di Yogyakarta. Hasil lain dari adanya Kongres ini yakni diputuskan pula hendak mendirikan *studiefonds* untuk

² Bambang Suwondo, dkk. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978), hlm. 71.

³ Ahmaddani G. Martha, *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. (Jakarta: Indo-Media Communication, 1992), hlm. 139.

anak-anak putri yang pandai tetapi tidak mampu, memberantas perkawinan anak-anak dan memajukan kepanduan untuk anak-anak putri.⁴

Kongres Perempuan Indonesia Pertama juga berhasil menetapkan pengurus baru. Sementara itu dengan diadakannya Kongres Perikatan Perempuan Indonesia di Jakarta pada tanggal 28-31 Desember 1929 maka nama perkumpulan ini kemudian diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Demikianlah sejak adanya peristiwa tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta maka pada saat Kongres Perempuan Indonesia Ketiga tahun 1938 tanggal dan bulan tersebut diperingati sebagai hari ibu hingga sekarang.

A. KAJIAN PUSTAKA

Penulisan skripsi ini memfokuskan pembahasan pada Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928 dan perkembangan Kongres Perempuan Indonesia. Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga pembahasan yaitu, pergerakan wanita masa pergerakan nasional, Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928 dan perkembangan Kongres Perempuan Indonesia.

Pergerakan wanita masa pergerakan nasional dikaji dalam buku karya Marwati Djoened P & Nugroho Notosusanto yang berjudul *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900-1942)*. Selain itu didukung juga oleh buku A. K. Pringgodigdo yang berjudul *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Buku ini membahas mengenai pergerakan wanita yang terbagi menjadi tiga periode yakni sebelum tahun 1920, masa tahun 1920-1930 dan setelah 1930. Pergerakan wanita pada masing-masing periode memiliki ciri-ciri masing-masing.

Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928 dikaji dalam bukunya Susan Blackburn yang berjudul *Kongres Perempuan Indonesia Pertama: Tinjauan Ulang*. Buku ini merupakan terbitan dari fotokopi majalah Isteri edisi Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang memuat rekam proses berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia Pertama. Selain menggunakan buku tersebut juga digunakan juga buku karya Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita yang berjudul *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22*

⁴ Bambang Suwondo, *loc.cit.*

Desember 1958 yang berisi rangkaian acara, pidato-pidato yang dibacakan sampai proses yang ada selama berlangsungnya acara Kongres ini.

Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI II) berlangsung di Jakarta pada tahun 1935 dengan agenda mengeratkan hubungan persaudaraan antara organisasi-organisasi wanita Indonesia.⁵ Setelah itu, Kongres Perempuan Indonesia Ketiga (KPI III) berlangsung di Bandung tahun 1938 yang menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Kongres ini terus berlangsung sampai Kongres Perempuan Indonesia Keempat (KPI IV) tahun 1941.

Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia dikaji dalam buku *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* karya Fauzie Ridjal. Buku ini memuat tentang beberapa artikel yang membahas mengenai perkembangan Kongres Perempuan Indonesia. Selain menggunakan buku tersebut, pembahasan juga dikaji dalam buku *Indonesia dalam Arus Sejarah 5: Masa Pergerakan Kebangsaan* yang ditulis oleh Taufik Abdullah dkk dimana dalam buku ini dibahas mengenai perkembangan Kongres Perempuan Indonesia dimulai sejak Kongres Perempuan Indonesia Kedua sampai pada berdirinya organisasi baru anggota Kongres.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk lisan.³ Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis menurut Kuntowijoyo yang mempunyai lima tahapan, yaitu: pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

a. Pemilihan topik

Tahap awal dalam melakukan penelitian maupun penulisan yaitu menentukan topik. Penentuan topik menjadi penentu langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya agar peneliti fokus dalam pencarian sumber. Topik dipilih sebaiknya berdasarkan: (1) kedekatan emosional dan (2) kedekatan intelektual. Menentukan topik tentu bukanlah hal yang mudah, dimana peneliti dituntut untuk cerdas dan bijak dalam memutuskan

⁵ Marwati Djoened P & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900-1942)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 425.

suatu topik tertentu yang akan dikaji. Mulai dari menarik atau tidaknya suatu topik, ketersediaan sumber data, serta kesesuaian dengan disiplin ilmu yang ditekuninya.

b. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *Heuriskein* yang berarti mencari atau menemukan jejak-jejak sejarah. Heuristik merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah menurut sifatnya dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dapat diperoleh dari pelaku sejarah atau kesaksian secara langsung oleh seseorang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sementara sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku yang ditulis oleh salah seorang anggota yang ikut Kongres Perempuan Indonesia Pertama. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku yang relevan dengan topik yang diteliti.

c. Verifikasi

Tahap kedua yang ditempuh adalah verifikasi yang merupakan kegiatan meneliti untuk menemukan validitas dan realibilitas sumber sejarah melalui kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern berkaitan erat dengan masalah autentisitas yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keaslian sumber dan keutuhan sumber yang dipakai. Sedangkan kritik intern berkaitan erat dengan masalah kredibilitas yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran sumber tersebut. Kegiatan kritik sumber dilakukan oleh peneliti pada saat membaca sumber untuk mendapatkan fakta sejarah. Penulis menemukan sumber buku dari Kongres Wanita Indonesia berjudul *Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia* yang kertasnya sudah menguning dan penulisannya menggunakan mesin ketik serta berejaan lama.

d. Interpretasi

Menguraikan informasi dari data-data dan sumber yang sudah diperoleh serta sudah dipilih merupakan tahap dimana peneliti harus bisa berfikir logis dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu sejarah. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan. Setiap sumber sejarah pasti memunculkan beberapa tafsiran berbeda dari tiap penulis. Langkah ini menuntut kecermatan obyektifitas yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk menyatukan

hasil interpretasi penulis terhadap data yang diperoleh dilakukan sintesis yakni penggabungan atau pengelompokan sesuai dengan topik yang dibahas.

e. Historiografi

Tahap akhir dalam metode sejarah kritis yaitu penulisan (historiografi), dari serangkaian tahap itu kemudian dituangkan peneliti dalam penulisan. Dukungan sumber-sumber yang valid serta lengkap, akan membantu penelitian ini menjadi penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan pula sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

II. PEMBAHASAN

A. PERGERAKAN WANITA MASA PERGERAKAN NASIONAL

Abad ke XIX terjadi perubahan politik dalam pemerintahan kolonial Belanda. Muncul tokoh Van Deventer dengan gagasan Politik Etis. Pemikiran itu didukung oleh kaum demokrat liberal yang pada akhirnya membuat pemerintah harus membentuk lembaga pendidikan. Pemerintah lalu membuka sekolah untuk mendidik calon-calon pekerja yang terlatih dan terampil pada bidang pekerjaan yang diperlukan. Pendidikan itu kecuali memberi latihan praktis pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan demi meningkatkan derajat dan persamaan kedudukan dalam masyarakat. Awal abad ke XX muncul gerakan baru untuk kemerdekaan Indonesia.

Hasil dari adanya pendidikan itu adalah timbulnya golongan elit nasional atau kaum terpelajar yang kemudian mendirikan Budi Utomo. Kaum terpelajar ini mulai mempunyai pandangan baru tentang nasionalisme dan wanita. Sementara itu, perubahan-perubahan yang terjadi pada awal abad XX dengan munculnya Budi Utomo tidaklah berarti perubahan terjadi pada kaum pria saja tetapi perbaikan itu juga menyangkut perbaikan kaum wanita, karena bagaimanapun wanita mempunyai peranan yang besar dalam keluarga sebagai istri dan ibu anak-anaknya. Kaum wanita pun bangkit dan mendirikan perkumpulan-perkumpulan wanita.

Hakekatnya kesadaran nasional tidaklah identik dengan politik menentang penjajahan. Politik menentang penjajahan hanyalah salah satu manifestasi kesadaran nasional. Pokok terpenting ialah usaha untuk ikut serta memajukan bangsa.⁶ Semangat

⁶Slamet Mulyono, *Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia Djilid III*. (Jakarta : P.N Balai Pustaka,1969), hlm 121.

kebangsaan yang tumbuh dan berkembang ini telah membawa pengaruh yang besar pada kaum wanita pribumi. Sama seperti kaum laki-laki mereka tumbuh kesadarannya akan situasi dan kondisi hidup dalam masyarakat yang terjajah.⁷ Mereka menyadari berbagai masalah yang dihadapi oleh orang Indonesia khususnya kaum wanita. Banyak hambatan yang dihadapi oleh kaum wanita untuk dapat menentukan sendiri kehendaknya.

Periode Pergerakan Wanita Indonesia terbagi menjadi Pergerakan Wanita sebelum tahun 1920, Pergerakan Wanita tahun 1920-1930, dan Pergerakan Wanita sesudah tahun 1930. Pergerakan wanita awal abad XX identik dengan pergerakan pada wilayah sosial dan pendidikan. Mereka lebih banyak bergerak pada perbaikan kedudukan sosial dan peningkatan kecakapan melalui pendidikan maupun keterampilan serta perbaikan dalam hidup keluarga, perkawinan dan mempertinggi kecakapan sebagai seorang ibu.⁸ Urusan politik belum menjadi konsentrasi utama pergerakan wanita awal abad XX. Soal-soal politik seperti hak pemilihan sama sekali tidak menjadi perundingan, sebab kaum laki-lakipun tidak mempunyai hak, soal kemerdekaan tanah air sama sekali masih jauh.⁹

Walaupun pergerakan wanita pada masa permulaan itu adalah merupakan gerak perorangan dan tidak dalam susunan perkumpulan, namun itu merupakan suatu langkah maju dalam proses pembaharuan. Tujuan dari perkumpulan-perkumpulan wanita pada masa itu (1904-1920) adalah perbaikan kedudukan dalam hidup keluarga dan perkawinan, memperluas kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga dengan jalan menambah lapangan pengajaran, memperbaiki pendidikan dan mempertinggi kecakapan-kecakapan khusus untuk wanita.

Pergerakan wanita antara tahun 1920-1927 mulai tegas bahkan ada yang ingin melangkah ke arah pergerakan politik. Setelah tahun 1920 organisasi wanita semakin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dilakukan bersama-sama organisasi sosial dan politik pada umumnya. Perkumpulan

⁷ Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm 411.

⁸ Suhartono, *op.cit.*, hlm. 102.

⁹ Pringgodigdo, A.K, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. (Jakarta: Dian Rakyat, 1994), hlm 22.

wanita yang didirikan tahun 1920-1930 dapat dibagi menjadi tiga yakni: (1) perkumpulan yang menjadi bagian wanita dari partai politik atau perkumpulan pergerakan yang sudah ada, (2) perkumpulan dari wanita terpelajar yang bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan kepandaian puteri yang khusus, dan (3) organisasi pemudi terpelajar yang merupakan bagian dari perkumpulan pemuda yang sudah berdiri.¹⁰

Antara tahun 1929-1933 kaum wanita mengubah taktik perjuangannya, yaitu dengan cara ikut mendukung aksi kaum pergerakan nasional baik yang dilancarkan dalam Mosi Soetardjo tahun 1936 maupun Tuntutan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) tahun 1939 tentang Indonesia Berparlemen.¹¹ Gerakan wanita pada masa ini tidak hanya menjadi bagian wanita dari organisasi pergerakan, tetapi sudah terdapat organisasi wanita yang berdiri sendiri secara mandiri. Gerakan wanita juga sudah mulai memperkaya wilayah gerak organisasi wanita termasuk keterlibatan dalam wilayah politik.

B. KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PERTAMA TAHUN 1928

Paham kebangsaan dan persatuan Indonesia berkembang dalam beberapa jenis organisasi wanita. Organisasi wanita saling membulatkan tekad untuk mendukung persatuan Indonesia. Diilhami oleh semangat Sumpah Pemuda, kaum wanita yang aktif dalam organisasi-organisasi wanita berinisiatif untuk menyatukan gerakan mereka. Semangat persatuan dan kesatuan yang terus berkembang menjadi dasar bagi meningkatnya semangat dan kesadaran nasional.¹² Kongres perempuan Indonesia Pertama diprakarsai oleh tujuh organisasi wanita yakni Wanita Taman Siswa, Wanita Utomo, JIBDA, *Jong Java* bagian Wanita, Wanita Katholik, Aisyiyah dan Putri Indonesia.

Kongres Perempuan Indonesia Pertama dilaksanakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Dalem Joyodipuran Yogyakarta. Kongres ini diprakarsai oleh tiga orang tokoh wanita yakni: R.A. Soekonto dari Wanita Utomo, Nyi Hajar Dewantara dari

¹⁰ Bambang Suwondo, dkk., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978), hlm. 102.

¹¹ Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 59.

¹² Marwati Djoened P & Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm 417.

Wanita Taman Siswa dan Sujatin dari Putri Indonesia.¹³ Kongres ini dihadiri kurang lebih 30 perkumpulan wanita. Perkumpulan wanita yang hadir antara lain Aisyiyah, Wanita Taman Siswa, Wanito Utomo, Budi Rini, JIBDA, Darmo Laksmi, Budi Wanito, Karti Woro, Putri Budi Sedjati, Putri Indonesia, Wanita Katholik, dan lain-lain. Perkumpulan laki-laki yang hadir antara lain dari Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia Pimpinan Pusat, Pemuda Indonesia (*Hoofdb*) Pimpinan Pusat, Partai Syarikat Islam (Yogyakarta), dan *Jong Java* (Yogyakarta).

Acara kongres ini berlangsung selama tiga hari tiga malam dengan agenda masing-masing. Setiap malam berlangsung acara pertemuan dan persidangan tertutup antara utusan tamu, anggota komite pusat dan subseksi sedangkan setiap siang hari dilakukan persidangan umum dengan acara pembacaan pidato-pidato dari masing-masing utusan. Sebelum kongres, beberapa usulan telah diajukan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan. Walaupun tidak diketahui apa yang telah terjadi dalam sidang-sidang tertutup, suasana kongres menjadi jelas ketika usul-usul awal itu dibandingkan. Semua organisasi yang terlibat dengan jelas menginginkan dibentuknya suatu persekutuan yang berkelanjutan.

Kongres ini berhasil memutuskan untuk mendirikan gabungan atau federasi perkumpulan wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). PPI merupakan organisasi seperti perkumpulan biasa, yaitu dipimpin oleh Pengurus Harian sedikitnya terdiri dari Ketua, Penulis, Bendahara dan dua orang Comissaris. Kontribusi sebagai anggota PPI yang dikeluarkan sedikitnya 1 f -. Hasil lain dari adanya kongres ini yakni diputuskan hendak mendirikan *studiefonds* untuk anak-anak gadis yang pandai tetapi tidak mampu, dan memperkuat pendidikan *padvindsterij* (kepanduan putri). Selain itu kongres berkeputusan untuk mencegah perkawinan anak-anak dengan cara tiap anggota harus membuat propaganda tentang buruknya perkawinan anak-anak dan minta tolong kepada pegawai Pamong Praja supaya memberi penerangan kepada rakyat tentang hal ini.

C. PERKEMBANGAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA

Salah satu hasil dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama yakni dibentuknya suatu federasi baru bernama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Kongres

¹³ Sagimun, M D, *Peranan Pemuda dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi*. (Jakarta: PT Bina Aksara, 1989), hlm 181.

mengadakan beberapa perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Perubahan AD-ART salah satunya yakni dicantumkan bahwa yang menjadi anggota PPI adalah pusat-pusat organisasi wanita bukan cabang-cabang.¹⁴ Bentuk badan hukum dan namanya diubah. Nama federasi sebelumnya Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) yang kemudian berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII).

Antara KPI I dan KPI II diadakan 3 kali Kongres PPII. Kongres berlangsung pada 13-18 Desember 1930 di Surabaya, 25-29 Maret 1932 di Solo, dan 6-8 Mei 1933 di Jakarta. PPII bermaksud menjadi gabungan organisasi wanita Indonesia. PPII berazaskan kebangsaan bukan agama dan politik, menjadi bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia, menjunjung tinggi kewanitaan dan meneguhkan iman.

Pada tanggal 6-8 Mei 1933 dipimpin oleh Nyonya Suwandi, PPII mengadakan pertemuan di Jakarta. Para wakil organisasi anggota PPII yang hadir sepakat untuk berinisiatif mengadakan Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI II) karena banyak organisasi yang baru dibentuk dan belum menjadi anggota PPII. Setelah segala persiapan dianggap cukup, panitia Kongres yang antara lain beranggotakan Sri Mangoensarkoro, Suwarni Pringgodigdo, Nyonya Abdulrachman dan Nyonya Moh. Husni Thamrin mengadakan Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI II) di Jakarta pada tanggal 20-24 Juli 1935. Kongres ini dipimpin oleh Sri Mangoensarkoro dan dibantu St Suparto.

Anggota pengurus kongres terdiri dari anggota berbagai perkumpulan wanita yang menjadi anggota kongres. Sehingga KPI II ini bersifat umum dan didukung oleh organisasi wanita dari berbagai aliran dan daerah. Hal ini menghilangkan kekhawatiran bahwa KPI menjadi kongres satu golongan saja.¹⁵

KPI II juga menaruh perhatian yang besar pada nasib kaum pekerja wanita dan anak-anak. Kongres membentuk suatu badan yang berkewajiban menyelidiki keadaan kaum buruh wanita diseluruh Indonesia. Badan ini dinamakan Badan Penyelidik Perburuhan Perempuan Indonesia (BPPPI). Hal lain yang terjadi setelah KPI II

¹⁴ Maria Muharam Wiranatakusuma, "Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)". Dalam Yayasan Wanita Pejoang. Dalam *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu Setelah Kartini 1904-1984*. (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1984), hlm. 272.

¹⁵ Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 45.

berlangsung adalah pembubaran PPII. Pertemuan yang diadakan tanggal 14-15 September 1935 di Yogyakarta menyepakati bahwa PPII membubarkan diri karena asas dan tujuannya sama dengan KPI. Sehubungan dengan itu, semua harta kekayaan PPII termasuk Seri Derma diserahkan kepada KPI yang sudah menjadi badan federasi organisasi-organisasi wanita.

Kongres Perempuan Indonesia Ketiga (KPI III) diadakan di Bandung pada tanggal 23-27 Juli 1938. Kongres ini dipimpin oleh Emma Poeradiredja, Ketua Pasundan Istri Bandung. Adapun asas dan tujuannya sama dengan KPI II. Asas-asas kemudian dipertegas lagi dengan ditambahkan bahwa untuk menjalankan kewajiban sebagai Ibu Bangsa maka KPI harus menuntut persamaan hak dan harga antara laki-laki dan wanita, persamaan harus didasarkan pada kodrat dan kewajiban masing-masing. Acara-acara yang berlangsung yakni Resepsi yang dibuka oleh ketua Kongres, rapat-rapat tertutup, rapat-rapat umum dan Darmawisata.¹⁶ Hal-hal penting yang diputuskan dalam KPI III diantaranya ialah pembentukan Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP), mendirikan komisi untuk membuat rancangan peraturan perkawinan yang diketuai oleh Maria Ulfah Santoso, mendukung P4A dan menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu.¹⁷

Kongres Perempuan Indonesia Keempat (KPI IV) berlangsung di Semarang pada tanggal 25-28 Juli yang dipimpin oleh Nyonya Sunaryo Mangunpuspito. Kongres ini merupakan Kongres terakhir sebelum pendudukan Jepang di Indonesia. Maksud dan asas kongres seperti pada KPI III. Acara-acara KPI IV yakni: resepsi, rapat-rapat tertutup dan rapat-rapat umum. Kongres menyatakan mendukung penuh tuntutan "Indonesia Berparlemen" dari GAPI serta hak untuk mempersiapkan diri secara militer menghadapi perang mendatang. Kongres juga menuntut hak pilih penuh bagi wanita Indonesia. Suatu badan pekerja dibentuk guna memerangi buta huruf, lowongan kerja bagi wanita Indonesia. Rancangan Undang-Undang perkawinan berdasar Islam disusun, juga tentang peningkatan ekonomi kaum wanita umumnya.

¹⁶ Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita, *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*. (Jakarta: Percetakan Negara, 1958), hlm. 32.

¹⁷ Marwati Djoened P & Nugroho Notosusanto, *loc.cit.*

III. KESIMPULAN

Timbulnya pergerakan nasional dimulai abad ke XIX dengan diberlakukannya Politik Etis yang merupakan ide dari Van Deventer yakni irigasi, edukasi dan transmigrasi. Hasil dari adanya pendidikan ini adalah timbulnya golongan elit nasional atau kaum terpelajar yang kemudian bersama-sama mendirikan Budi Utomo. Awal abad ke XX muncul gerakan baru untuk kemerdekaan Indonesia. Kaum terpelajar ini mulai mempunyai pandangan baru tentang nasionalisme dan wanita. Usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan wanita telah dirintis oleh Kartini dengan ide-ide yang cemerlang. Perubahan-perubahan yang terjadi pada awal abad XX dengan munculnya Budi Utomo turut serta membawa perbaikan bagi kaum wanita.

Periode pergerakan wanita terjadi dalam tiga periode yakni pergerakan wanita sebelum tahun 1920, pergerakan wanita tahun 1920-1930 dan pergerakan wanita setelah tahun 1930. Pergerakan wanita sebelum tahun 1920/awal abad XX identik dengan pergerakan dalam bidang sosial dan pendidikan. Mereka lebih banyak bergerak pada perbaikan kedudukan sosial dan peningkatan kecakapan melalui pendidikan maupun keterampilan serta perbaikan dalam hidup keluarga, perkawinan dan mempertinggi kecakapan sebagai seorang ibu. Pergerakan wanita antara tahun 1920-1927 mulai tegas bahkan ada yang melangkah kearah pergerakan politik. Antara tahun 1929-1933 kaum wanita mengubah taktik perjuangannya dengan cara ikut mendukung aksi kaum pergerakan nasional. Gerakan wanita pada masa ini tidak hanya menjadi bagian wanita dari organisasi pergerakan, tetapi sudah menjadi organisasi wanita yang berdiri sendiri secara mandiri.

Organisasi wanita saling membulatkan tekad untuk mendukung persatuan Indonesia. Diilhami oleh semangat Sumpah Pemuda, kaum wanita yang aktif dalam organisasi-organisasi wanita berinisiatif untuk menyatukan gerakan mereka. Gagasan tersebut terwujud dalam Kongres Perempuan Pertama. Organisasi-organisasi pemrakarsa Kongres Perempuan Indonesia yakni Wanita Taman Siswa, Wanita Utomo, *Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling* (JIBDA), *Jong Java Dames Afdeeling*, Wanita Katholik, Aisyiyah, dan Putri Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia Pertama dilaksanakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Dalem Joyodipuran Yogyakarta. Kongres ini dihadiri kurang lebih 30 perkumpulan wanita. Acara kongres berlangsung selama tiga hari tiga malam dengan agenda masing-masing. Kongres ini memutuskan

untuk mendirikan gabungan perkumpulan wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) dan hendak mendirikan *Studiefonds* untuk anak-anak gadis yang pandai tetapi tidak mampu dan memberantas perkawinan anak-anak.

Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia yakni Perikatan Perempuan Indonesia yang didirikan tanggal 25 Desember 1928. Nama federasi kemudian berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI II) dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20-24 Juli 1935. Jumlah anggota KPI II bertambah besar dibandingkan dengan KPI I. Kongres Perempuan Indonesia Ketiga (KPI III) diadakan di Bandung tanggal 23-27 Juli 1938 yang dipimpin oleh Ny. Emma Puradireja, Ketua Pasundan Istri Bandung. Kongres Perempuan Indonesia Keempat (KPI IV) berlangsung di Semarang pada tanggal 25-28 Juli yang dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito. Kongres ini merupakan Kongres terakhir sebelum pendudukan Jepang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suhartono. (1994). *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2] Bambang Suwondo, dkk. (1977/1978). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- [3] Ahmaddani G. Martha. (1992). *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Indo-Media Communication.
- [4] Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto. (2009). *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900-1942)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [5] Slamet Mulyono. (1969). *Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia Djilid III*. Jakarta : P.N Balai Pustaka.
- [6] Pringgodigdo, A.K. (1994). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- [8] Bambang Suwondo, dkk. (1977/1978). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

- [9] Sudiyo. (2002). *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [10] Sagimun, M D. (1989). *Peranan Pemuda dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- [11] Maria Muharam Wiranatakusuma. (1984). "Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)". Dalam Yayasan Wanita Pejoang. *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu Setelah Kartini 1904-1984*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, hlm. 271-291.
- [12] Kongres Wanita Indonesia. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [13] Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita. (1958). *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*. Jakarta: Percetakan Negara.

Reviewer

Yogyakarta, Juli 2015
Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd
NIP. 197706182003122001

Terry Irenewaty, M. Hum.
NIP. 195604281982032003